

LAPORAN HASIL PENELITIAN

BIDANG KELEMBAGAAN



PENATAAN NASKAH UJIAN PERKABUPATEN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KELANCARAN PELAKSANAAN UJIAN MAHASISWA PROGRAM PENDAS DI UPBJJ-UT PADANG

Oleh:

Harnon (Ketua)

Andriyansah (Anggota)

UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH

UNIVERSITAS TERBUKA

PADANG

2010

DAFTAR ISI

BAB I	Halaman
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Fokus Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II	
LANDASAN TEORI	
2.1 Manajemen Penataan.....	6
2.2 Prinsip Kerja Efektif.....	8
2.3 Persiapan Ujian.....	11
2.4 Pelaksanaan Ujian/Evaluasi.....	11
2.5 Kerangka Berpikir.....	21
BAB III	
METODOLOGI PENELITIAN	
1.1 Jenis Penelitian.....	23
1.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	23
1.3 Sumber Data dan Objek Penelitian.....	24
1.4 Populasi dan Sampel.....	24
1.5 Instrumen Penelitian.....	24
1.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25
1.7 Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV	
ANALISIS DATA	
4.1 Deskriptif.....	27
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	35
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Universitas Terbuka adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan sistem pendidikan jarak jauh dan terbuka. Sama halnya dengan perguruan tinggi Negeri lain, setiap enam bulan sekali UT mengadakan evaluasi terhadap kemampuan daya serap mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajarinya melalui tutorial maupun yang belajar secara mandiri yang dinamakan ujian akhir semester (UAS), baik untuk program Pendas maupun program Non Pendas.

Untuk terlaksananya ujian mahasiswa program Pendas, Universitas Terbuka Pusat telah menyiapkan dan menata naskah ujian untuk disebarkan ke setiap UPBJJ –UT yang ada di propinsi di Indonesia. Dalam penataan naskah ujian tersebut, Universitas Terbuka menyiapkan pengepakan sampul naskah ujian berdasarkan data jumlah mahasiswa yang ada di setiap Kabupaten/Kota yang ada di UPBJJ –UT. Penataan yang demikian kurang efektif, karena naskah tersebut perlu ditata ulang kembali di UPBJJ-UT karena adanya lokasi ujian perluasan. Ujian perluasan adalah ujian yang diikuti oleh mahasiswa yang terdaftar di suatu kecamatan tertentu. Jumlah mahasiswa yang mengikuti ujian di lokasi perluasan selalu bervariasi jumlahnya sesuai dengan semester yang mereka tempuh. Untuk memenuhi kebutuhan naskah ujian di lokasi perluasan, petugas UPBJJ yang terlibat dalam kepanitiaan persiapan ujian harus mendata jumlah dan mata kuliah apa yang harus diikuti oleh masing-masing peserta ujian.

Untuk menyiapkan kebutuhan tersebut, panitia ujian di UPBJJ harus menata ulang kembali sampul naskah ujian yang sudah disiapkan oleh UT pusat, dengan cara membuka sampul naskah ujian tersebut dan membagi-bagi sesuai kebutuhan naskah di lokasi ujian perluasan, kemudian dimasukkan kembali ke dalam sampul yang baru dan diberi

identitas naskah seperti kode naskah, nama mata kuliah, hari dan jam ujian serta diberi lem guna menjaga kerahasiaan naskah ujian tersebut. Hal ini disebabkan karena penataan sampul naskah ujian dari UT pusat hanya berdasarkan jumlah mahasiswa peserta ujian yang ada di Kabupaten/Kota yang ada di UPBJJ –UT Padang.

Pekerjaan penataan ulang kembali pengepakan sampul naskah ujian di UPBJJ oleh panitia ujian adalah pekerjaan yang cukup berat dan memikul rasa tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan naskah tersebut agar tidak terjadi kebocoran menjelang ujian berlangsung. Di samping itu panitia harus menata kembali daftar 20-an yang disiapkan hanya berdasarkan data mahasiswa yang terdaftar di Kabupaten/Kota tertentu, karena mahasiswa diberi kesempatan untuk ujian di lokasi perluasan asal memenuhi kriteria yang ditentukan. Jadi di sini apa yang sudah disiapkan oleh panitia dari UT pusat dalam pengepakan sampul naskah ujian tidak efektif, karena tidak dapat digunakan secara langsung, tetapi perlu ditata ulang kembali di UPBJJ.

Permasalahan lain adalah penggabungan antara peserta ujian uraian dengan ujian objektif dalam satu lokal. Dalam pengiriman hasil ujian sering terjadi kekeliruan, karena tidak dipisahkan antara kedua jenis hasil ujian tersebut. Pada hal hasil ujian uraian dengan ujian objektif pemeriksaannya di dua lokasi yang berbeda. Ujian objektif diperiksa langsung di UT pusat, sedangkan ujian uraian diperiksa di UPBJJ sentra. Pengawas ujian sering lupa memisahkan hasil ujian tersebut dalam sampul yang berbeda. Akhirnya nilai mahasiswa sering terlambat keluar, bahkan kadangkala bisa nilainya tidak keluar karena hasil jawaban ujiannya hilang/tidak ditemukan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang mendasar dalam persiapan, pelaksanaan, serta pengiriman hasil ujian adalah bahwa dalam mempersiapkan ujian perlu rancangan yang terprogram dengan baik dan disesuaikan dengan situasi di lapangan. Karena pada umumnya lokasi ujian cukup banyak, ditambah lagi dengan

adanya lokasi ujian perluasan, sementara penataan daftar 20-an masih berdasarkan nama dan jumlah mahasiswa yang ada di Kabupaten/ Kota, belum ditata berdasarkan Kecamatan dimana mahasiswa pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa, di samping itu kode yang dicantumkan dalam daftar 20-an masih menggunakan kode pos kecamatan, bukan nama kecamatan. Permasalahan lain penataan sampul naskah ujian yang dikirim dari UT Pusat hanya disiapkan secara kelompok berdasarkan jumlah peserta ujian yang ada di Kabupate/Kota yang ada di lingkungan UPBJJ UT.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan dibukanya kesempatan bagi mahasiswa untuk ujian di lokasi perluasan berdasarkan surat **Pembantu Rektor III no. 7883/H31/UJ/2010 tanggal 27 April 2010**, perihal **Tanggapan Permintaan Ujian Perluasan Pendas 2010.1 di UPBJJ-UT Padang**, dengan adanya surat PR III ini, UPBJJ-UT Padang diberi peluang untuk membuka lokasi ujian perluasan di beberapa kecamatan yang memenuhi persyaratan, namun disisi lain petugas di UPBJJ harus menata ulang kembali baik itu daftar 20-an maupun naskah ujian, karena jumlah naskah yang dikirim hanya dicocokkan dengan jumlah peserta ujian yang terdaftar di Kabupaten/ Kota tertentu saja. Sementara untuk peserta ujian di lokasi perluasan jumlahnya tidak selalu pas sesuai dengan pengepakan sampul naskah yang disiapkan oleh UT Pusat, sehingga sampul naskah terpaksa dibuka untuk dipecah kembali, atau dibagi untuk memenuhi kebutuhan naskah bagi mahasiswa di tempat lain.

Permasalahan di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penataan daftar 20-an dari UT Pusat belum efektif, karena tidak bisa digunakan secara maksimal di UPBJJ.
2. Pendistribusian naskah ujian mahasiswa Program Pendas belum bisa digunakan secara langsung oleh petugas di UPBJJ untuk disebarkan

- ke lokasi ujian, tetapi masih memerlukan penataan ulang kembali di UPBJJ sebelum ujian dilaksanakan.
3. Penataan naskah Peserta ujian uraian dan ujian objektif masih berada dalam satu lokal, sehingga dalam pengiriman hasil ujian sering terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi mahasiswa itu sendiri.
 5. Sampul naskah ujian uraian dengan ujian pilihan ganda sulit untuk dibedakan karena tidak ada pembeda yang jelas antara keduanya.

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang mendasar dalam penelitian ini adalah “Penataan daftar 20-an dan penataan sampul naskah ujian belum efektif dan efisien . UPBJJ perlu mempersiapkan penataan ulang guna terlaksananya ujian dengan baik di UPBJJ –UT Padang. Berdasarkan fokus di atas dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaiamanakah langkah-langkah untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan proses kerja dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengirimkan hasil ujian program pendas ke UT Pusat.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengirimkan hasil ujian mahasiswa program Pendas ke UT Pusat. Secara khusus penelitian ini untuk melihat apakah penataan daftar 20-an berdasarkan nama mahasiswa di kecamatan, penataan pengepakan naskah ujian per Kecamatan, dan pemisahan antara mahasiswa yang ujian tes uraian dengan tes objektif, serta membedakan sampul hasil ujian uraian dengan hasil ujian objektif dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja di UPBJJ –UT Padang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada petugas di UPBJJ-Padang dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengirimkan hasil ujian mahasiswa program Pendas ke UT Pusat di masa-masa mendatang. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat hasil kerja yang dikirim dari UT Pusat dapat dimanfaatkan secara langsung di UPBJJ di seluruh Indonesia, Khususnya di UPBJJ-UT Padang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen Penataan

Brantas (2009), mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*”- Pengelolaan, sedangkan pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola. Menurut Hasibuan (2001), manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, karena manajemen diartikan mengatur. Selanjutnya Brantas (2009) mengatakan bahwa manajemen merupakan sebuah subjek yang sangat penting karena ia mempersoalkan penetapan serta pencapaian tujuan. Manajemen tidak saja mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkombinasikan secara efektif bakat orang-orang dan mendayagunakan sumber-sumber tersebut, kadang-kadang dinyatakan enam *M* dari manajemen yaitu 1) *Men*, tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif; 2) *Money*, uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan; 3) *Methods*, cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan; 4) *Materials*, bahan-bahan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan; 5) *Machines*, mesin-mesin atau alat-alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan; 6) *Markets*, pasar untuk menjual out-put dan jasa-jasa yang dihasilkan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penting sekali penataan/ pengaturan yang baik dalam merencanakan suatu pekerjaan, mulai dari menata orang yang akan dipekerjakan, dana yang harus disediakan, cara kerja yang efektif, mutu

dan hasil kerja yang diharapkan, sehingga nantinya sasaran yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Poerwadarminta (2003) efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya). Manjur atau mujarab dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang ditujukan. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi aktif dari anggota. Dari penjelasan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari suatu pekerjaan diperlukan kemauan yang keras, kecermatan yang tinggi, keseriusan, penuh perhitungan, dan mempunyai rasa tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang sedang dihadapinya. Dengan cara kerja yang demikian hasil yang diharapkan akan tercapai dengan baik. Sementara disisi lain efektivitas dan efisiensi adalah:

- i. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.
- ii. Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima. Sebagai contoh untuk menyelesaikan sebuah tugas,

si A mungkin membutuhkan waktu sekitar satu jam, sedangkan si B membutuhkan waktu selama dua jam. Maka dapat dilihat bahwa cara A lebih efisien dari cara B. Dengan kata lain tugas tersebut dapat selesai menggunakan cara dengan benar atau efisien.. (Sumber:<http://dewi.students-blog.undip.ac.id/2009/05/27/perbedaan-efisiensi-dan-efektivitas/> google)

2.2 Prinsip kerja efektif :

Berkut beberapa cara untuk meningkatkan efektif kerja

a. Rencana

Rencana itu ada hanya ketika ditulis. Kalau tidak ditulis berarti itu bukan rencana, melainkan (mungkin) hanyalah impian atau visi atau bahkan mimpi buruk. Siapapun tidak mempunyai rencana kecuali ditulis. Seperti kata Napoleon, **“Tidak ada yang sukses dalam perang kecuali sebagai konsekuensi dari rencana yang disiapkan dengan baik.”** Merencanakan sesuatu dengan tepat berarti harus mengetahui:

- 1) Pekerjaan apa yg akan diselesaikan?
- 2) Bagaimana melaksanakannya?
- 3) Kapan selesainya?
- 4) Di mana selesainya ?
- 5) Berapakah kecepatan melaksanakannya?

Rencanakan Pekerjaan dengan tepat. Dengan perencanaan yang tepat, puncak keberhasilan baru separuh dicapai. Perencanaan itu sukses hanya dengan pelaksanaan yang profesional.

b.Jadwal

Pekerjaan harus dijadwalkan. Jadwal yang efektif harus:

- 1) Pasti.
- 2) Selaras dengan jadwal-jadwal lainnya.

- 3) Sulit mencapai, namun mungkin tercapai.
- 4) Peganglah dengan teguh.

Penjadwalan yang baik akan mengefektifkan energi. Untuk itu Jangan sampai energi terbuang percuma hanya karena penjadwalan yang buruk.

c. Pelaksanaan

Setelah rencana yang tepat disiapkan, laksanakanlah rencana tersebut dengan:

- 1) Terampil
- 2) Teliti
- 3) Cepat
- 4) Tanpa usaha yang tak perlu
- 5) Tanpa penundaan yang tak perlu

Laksanakanlah rencana kerja tanpa memisahkannya dari pelaksanaan. Dengan kata lain, para perencana kerja harus mengomandani pelaksanaan dan para komandan itu harus turut serta merencanakan.

d. Pengukuran

Perkerjaan yang telah dilaksanakan haruslah diukur:

- 1) Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh diri;
- 2) Berdasarkan *progress report* (pekerjaan sebelumnya) yang telah lalu;
- 3) Berdasarkan *progress report* orang lain yang telah lalu;
- 4) Berdasarkan kuantitas; dan
- 5) Berdasarkan kualitas.

Untuk mengukur ketercapaian perencanaan pekerjaan, perlu dibuat rekam jejak perjalanan pelaksanaan pekerjaan. Nantinya akan berguna untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lainnya sebagai referensi.

e. Kontraprestasi

Apabila pekerjaan telah selesai dengan efektif, selayaknya mendapatkan balas jasa berupa:

- 1) Syarat kerja yang baik;
- 2) Kesehatan yang baik;
- 3) Kebahagiaan;
- 4) Pengembangan diri;
- 5) Uang; atau
- 6) Bentuk value lainnya.

(Sumber : <http://abulamedia.com/2009/10/13/5-prinsip-kerja-efektif/> google)

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan tugas dengan benar. Penyelesaian yang efektif belum tentu efisien begitu juga sebaliknya. Yang efektif bisa saja membutuhkan sumber daya yang sangat besar, sedangkan yang efisien barangkali memakan waktu yang lama, sehingga sebisa mungkin efektivitas dan efisiensi bisa mencapai tingkat optimum untuk keduanya. Untuk itu kalau dilihat penyiapan bahan pendukung untuk pelaksanaan ujian program Pendas belumlah efektif dan efisien, misal saja untuk daftar 20-an, pihak UPBJJ harus menata ulang kembali sesuai kondisi yang ada di lapangan. Begitu juga dengan pengepakan naskah ujian, UPBJJ harus mengepak ulang kembali sesuai jumlah peserta yang ada di lokasi ujian yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi di sini masih dibutuhkan tenaga yang akan membuat model baru sesuai situasi yang ada.

2.3 Persiapan Ujian

Prosedur persiapan berdasarkan ISO JKOP UJ01 bahan ujian dimulai dari persiapan bahan pendukung sampai dengan persiapan naskah ujian. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan naskah ujian tersedia tepat waktu di UPBJJ sesuai data registrasi dari BAAPM. Di samping itu juga untuk meminimalkan resiko kebocoran naskah ujian selama proses persiapan hingga siap didistribusikan ke UPBJJ. Dalam mempersiapkan bahan-bahan pendukung dan persiapan naskah ujian terdapat ketentuan bahwa bahan ujian akhir semester harus sudah diterima untuk lokasi UPBJJ zona satu 7 hari sebelum pelaksanaan ujian, zona dua, 5 hari sebelum pelaksanaan ujian, dan zona tiga, 3 hari sebelum pelaksanaan ujian. Setelah bahan pendukung sampai di masing-masing UPBJJ, maka panitia persiapan ujian mulai bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

2.4 Pelaksanaan ujian/Evaluasi

Prosedur pelaksanaan ujian sesuai dengan JKOP UJ02, dengan tujuan 1) memastikan bahwa semua mahasiswa yang teregistrasi di UPBJJ dan mempunyai KTPU dapat mengikuti ujian sesuai jadwal dan persyaratan. 2). Memastikan bahwa berkas ujian lengkap dan dapat diproses lebih lanjut. Adapun pengertian dari ujian/evaluasi yaitu suatu kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh informasi dan data yang sangat dibutuhkan dalam membuat keputusan. Dalam hubungan dengan proses pembelajaran. Slametio (1998:6) mengemukakan empat pengertian evaluasi, yaitu:

- a. Evaluasi adalah proses memahami atau memberi arti, mendapatkan dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi pihak-pihak pengambilan keputusan.
- b. Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya yang bersangkutan dengan kapabilitas peserta

- didik, guna mengetahui sebab –akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar.
- c. Dalam rangka mengembangkan sistem instruksional, evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai seberapa jauh program telah berjalan seperti yang telah direncanakan.
 - d. Evaluasi adalah suatu alat untuk menentukan apakah tujuan pendidikan dan apakah proses dalam pengembangan ilmu telah berada pada jalan yang diharapkan (Slamet.1998:6).

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian ujian/evaluasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan dengan cermat yang merupakan bagian integral dari pendidikan, sehingga arah dan tujuan evaluasi sejalan dengan tujuan pendidikan. Karena ujian/evaluasi tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pengajaran yang hendak dicapai. Perlu dirumuskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran, karena tidak mungkin menilai sejauh mana pencapaian hasil belajar peserta didik. Pada dasarnya setiap kegiatan penilaian memerlukan suatu kriteria tertentu sebagai acuan dalam menentukan batas ketercapaian objek yang dinilai. Hal ini sejalan dengan pendapat Dimiyati (2002) bahwa “Evaluasi merupakan proses sederhana memberikan atau menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan, kegiatan, keputusan untuk bekerja, proses dan peran objek.

Sehubungan dengan penilaian di atas, Universitas Terbuka dalam perkembangannya mempunyai visi, yaitu menjadi salah satu PTJJ unggulan di Asia tahun 2010 dan dunia tahun 2020. Secara konseptual dan filosofis merupakan wujud dari komitmen dan tanggung jawab untuk melakukan perubahan dan perbaikan mendasar dalam upaya peningkatan kualitas seluruh aspek layanan pendidikan yang disediakan bagi para pelanggan dan publik secara luas. Dengan visi tersebut, UT berupaya untuk menghasilkan berbagai produk pendidikan unggulan yang memiliki nilai *comparative and competitive*, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, UPBJJ-UT Padang sebagai salah satu dari 37 UPBJJ-UT di Indonesia sudah mengimplementasikan kebijakan mutu sesuai dengan standar kualitas dan sistem penjamin kualitas (simintas) yang ditetapkan UT. Hal ini didasarkan pada kebutuhan dan komitmen untuk membangun dan mengembangkan budaya kualitas pada semua aktivitas dan kebijakan manajerial. Melalui implementasi simintas, UPBJJ-UT Padang berusaha untuk memberikan masukan-masukan dalam melakukan setiap layanan pendidikan bagi mahasiswa UT dengan lebih baik dan berkualitas yang berstandar internasional yang dikembangkan oleh *International Standard Organization* (ISO), yakni ISO 9001-2000.

a. Tahap Persiapan

Universitas Terbuka (UT) adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Istilah jarak jauh berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media, baik cetak (modul) maupun non cetak (audio/video, computer/internet, siaran radio dan televisi). Makna terbuka adalah tidak ada pembatasan usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu registrasi, dan frekwensi mengikuti ujian. Batasan yang ada hanyalah bahwa setiap mahasiswa UT harus sudah menamatkan jenjang pendidikan menengah atas (SMA) atau yang sederajat.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, UT bekerja sama dengan semua perguruan tinggi negeri/ swasta serta instansi yang relevan yang ada di Indonesia. Di setiap provinsi atau kabupaten/kota yang terdapat perguruan tinggi negeri, tersedia unit layanan UT yang disebut UPBJJ-UT. Perguruan tinggi negeri setempat berperan sebagai Pembina UPBJJ-UT serta membantu dalam penulisan bahan ajar, bahan ujian, pelaksanaan tutorial, praktek/pratikum dan Ujian.

Untuk penyelenggaraan ujian, Universitas Terbuka terutama di UPBJJ, di seluruh Indonesia perlu melakukan persiapan ujian, pelaksanaan ujian, dan terakhir pengiriman hasil ujian ke UT pusat di Jakarta. Untuk tahap persiapan UPBJJ baru bisa bekerja setelah adanya bahan pendukung ujian yang didatangkan dari UT Pusat. Adapun bahan pendukung tersebut, mulai dari lembaran jawaban ujian (LJU), buku jawaban ujian (BJU), kartu tanda peserta ujian (KTPU), dan daftar 20-an.

Adapun langkah yang dilakukan oleh UPBJJ dalam rangka persiapan pelaksanaan ujian adalah terlebih dahulu koordinator registrasi dan pengujian membentuk panitia persiapan ujian dengan penanggung jawab secara langsung kepala UPBJJ. Panitia yang sudah dibentuk diajukan oleh koordinator kepada kepala UPBJJ untuk disahkan dalam bentuk rapat panitia persiapan ujian sekaligus dengan adanya Surat Keputusan Kepala UPBJJ tentang Susunan Panitia Persiapan Ujian. Dalam penyusunan kepanitiaan, semua staf yang ada di UPBJJ dilibatkan.

Proses kerja dalam pemisahan LJU dan BJU, setiap petugas dibagi berdasarkan lokasi kabupaten/kota. Mereka harus melakukan pendataan jumlah mahasiswa yang akan ikut ujian dan jumlah paket mata kuliah yang harus diikutinya sesuai semester yang sedang ditempuh. Adapun pedoman yang diambil sebagai acuan adalah data registrasi yang dituangkan dalam bentuk daftar 20-an.

Daftar 20-an adalah daftar peserta ujian dalam satu ruang ujian perjam dan hari ujian per lokasi/tempat ujian (UJ01-PK 16). Dalam daftar 20-an tersebut, petugas dari UT pusat hanya mencantumkan kode kecamatan sesuai nama mahasiswa terdaftar pertama kali menjadi mahasiswa UT. Dalam penyusunan tersebut sering antara satu kecamatan dengan kecamatan lain digabungkan saja. Petugas UPBJJ harus mengecek- ulang kembali daftar 20-an tersebut guna untuk mengetahui dan mengantisipasi dari mana asal

mahasiswa tersebut, di samping itu juga agar daftar tersebut tidak terkirim ke lokasi ujian yang lain, karena lokasi ujian selain di Kabupaten Kota juga ada yang namanya lokasi ujian perluasan.

Cara kerja yang telah dilakukan di UT pusat dalam penataan daftar 20-an belum praktis, karena petugas di UPBJJ harus mengecek kembali nama kecamatan sesuai kode Kecamatan yang telah dicantumkan dari UT Pusat. Di samping itu penyusunan daftar 20-an masih tercampur-aduk, mengharuskan petugas UPBJJ memilah dan memotong kembali daftar 20-an tersebut sesuai kode kecamatan yang ada, hal ini disebabkan sebahagian besar mereka ujian di lokasi perluasan. Untuk ujian di lokasi perluasan mahasiswa harus mengeluarkan biaya untuk semua petugas yang terlibat, dalam pelaksanaan ujian tersebut, termasuk untuk biaya petugas yang didatangkan dari UPBJJ. Untuk kelancaran pelaksanaan ujian di lokasi perluasan, daftar 20-an yang didatangkan dari UT Pusat harus digunting-gunting guna dipindahkan dan digabungkan dengan daftar 20-an yang menggunakan kode pos yang sama. Pekerjaan yang demikian jelas memakan waktu, di samping itu juga sering terjadi keterceceran daftar tersebut, karena potongan daftar tersebut misalnya hanya untuk satu atau dua orang saja, akibatnya mahasiswa harus menandatangani absen di daftar hadir manual.

Permasalahan pengguntingan dan penataulangan kembali daftar 20-an ini terjadi karena mahasiswa diberi kesempatan untuk bisa mengikuti ujian di kecamatan dimana mereka berdomisili yang diistilahkan dengan ujian di lokasi perluasan. Pemberian izin yang dikeluarkan oleh Pembantu Rektor III tentang pembukaan lokasi ujian perluasan, apabila jumlah peserta di Kecamatan mencukupi yaitu syarat batas minimal sebanyak 100 orang mahasiswa (disertai daftar dan tanda tangan mahasiswa). Lokasi ujian yang tersedia di Kabupaten cukup jauh dari tempat tinggal mahasiswa. Di sini pengurus kelompok belajar juga harus memenuhi segala persyaratan

lain yang berkaitan dengan pembukaan lokasi ujian perluasan tersebut.

Proses kerja seperti di atas masih kurang efektif dan efisien, mengingat hasil kerja yang sudah disiapkan oleh petugas di UT Pusat harus diacak kembali di UPBJJ. Akibatnya daftar 20-an dan absen yang sudah begitu rapi harus dipotong-potong kembali karena letak nama mahasiswa yang akan ikut ujian pada suatu lokasi perluasan sudah berada pada tempat yang tidak berurutan di dalam daftar 20-an. Hal ini karena petugas UT pusat mendata nama mahasiswa berdasarkan perkabupaten/Kota.

Di samping itu penataan paket naskah ujian juga disiapkan hanya berdasarkan jumlah peserta ujian yang ada di Kabupaten/Kota yang ada di UPBJJ –UT Padang. Akibatnya naskah yang sudah tersampul dengan rapi terpaksa ditata ulang kembali di UPBJJ guna untuk disiapkan sesuai jumlah kebutuhan yang diperlukan di lokasi ujian perluasan. Di sini petugas UPBJJ harus bekerja ekstra keras dan ekstra hati-hati serta harus menjaga jangan sampai lalai dan lengah serta menjaga kerahasiaan naskah jangan sampai terjadi kebocoran soal ujian. Dalam pengepakan ulang naskah ujian harus disesuaikan dengan jumlah peserta ujian dalam paket persemester dan paket persetiap hari ujian. Karena yang namanya lokasi ujian perluasan pada umumnya terletak jauh dari lokasi ujian Kabupaten/Kota. Apabila terjadi kekurangan naskah ujian akan berakibat fatal dan akan merugikan mahasiswa.

b. Tahap pelaksanaan

Sesuai dengan Standar ISO JKOP UJ02 prosedur pelaksanaan ujian meliputi tujuan, ruang lingkup, definisi, ketentuan umum dan dokumen terkait. Adapun tujuan adalah memastikan bahwa semua mahasiswa yang teregistrasi di UPBJJ dan mempunyai KTPU dapat mengikuti ujian sesuai jadwal dan

persyaratan, serta memastikan bahwa berkas ujian lengkap dan dapat diproses lebih lanjut.

Pelaksanaan ujian dilakukan secara serentak di seluruh UPBJJ di Indonesia. Adapun jadwalnya sudah ditentukan oleh UT pusat. Adapun petugas-petugas yang ditunjuk adalah petugas dari UPBJJ sendiri (ISO UJ02-PK08), namun dengan keterbatasan tenaga yang ada di UPBJJ, maka perlu ditambah dengan petugas dari Perguruan Tinggi Pembina yang dapat dipercaya dan loyal terhadap UT. Petugas tersebut dinamakan Penanggung Jawab Tempat Ujian (PJTU). Sebelum diberangkatkan petugas-petugas tersebut (PJTU) diberikan pengarahan teknis (Coaching) yang berhubungan dengan tugasnya nanti di lapangan. Adapun tujuannya adalah supaya segala permasalahan yang muncul nanti di lapangan dapat diatasi secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan di UT.

Adapun bantuan tenaga dari Perguruan Tinggi mitra dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jumlah tempat ujian yang tidak seimbang dengan jumlah staf yang ada di UPBJJ. Permasalahan yang kadangkala timbul adalah karena penempatan tenaga dari luar UPBJJ tersebut di lokasi perluasan dan hanya satu orang, apabila terjadi permasalahan yang mendasar kadangkala mereka tidak bisa memberikan solusi yang tepat sesuai aturan yang ada. Misalnya permasalahan mahasiswa yang sudah membayar SPP dan mempunyai KTPU, tetapi namanya tidak keluar di dalam daftar 20-an, petugas kadangkala tidak membenarkan mereka ikut ujian. Dengan alasan naskah tidak ada, kalau kebetulan mereka adalah yang sudah mengikuti ujian ulang. Sebenarnya solusinya petugas bisa konfirmasi ke UPBJJ-UT bagaimana solusi yang tepat sehingga tidak merugikan mahasiswa. Bahkan meminta mahasiswa tersebut untuk datang

secara langsung ke UPBJJ untuk mengikuti ujian. Kadangkala terjadi sebaliknya yaitu mahasiswa yang terlambat registrasi, kemudian mereka meminta kepada PJTU untuk diikutkan ujian dengan alasan mereka telah bayar SPP, petugas tidak melihat secara detil mengapa nama mahasiswa tersebut tidak keluar dalam daftar 20-an. PJTU membolehkan mahasiswa tersebut untuk ujian. Dengan demikian mahasiswa tentu akan menunggu hasil ujiannya nanti pada saat nilai UT sudah keluar. Setelah dicek nilai mereka tidak keluar, karena ketentuan di UT, apabila mahasiswa terlambat registrasi maka registrasinya tidak dapat diproses, dengan demikian hasil ujiannya juga tidak bisa diproses. Namun mereka tetap menuntut mengapa nilai mereka tidak keluar, sementara mereka ikut ujian. Hal ini akan menambah permasalahan di UPBJJ.

Adapun pemicu dari permasalahan adanya nama mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar 20-an antara lain: *pertama* mahasiswa lalai dalam melakukan registrasi ulang, *kedua*, petugas UPBJJ terlupa dalam memasukkan data mahasiswa tersebut ke dalam sistem aplikasi, *ketiga*, petugas dari UT Pusat tidak memasukkan data tersebut dalam daftar 20-an, padahal mereka melakukan registrasi sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Permasalahan-permasalahan yang timbul akan bisa di minimalisir apabila tenaga yang ada di UPBJJ ditempatkan di seluruh lokasi ujian baik lokasi Kabupaten/Kota maupun lokasi ujian perluasan. Karena permasalahan-permasalahan tersebut kebanyakan tidak dipahami secara detail oleh petugas di luar UT. Kalau memang harus juga menggunakan tenaga dari luar, UPBJJ harus mencari tenaga yang sudah berpengalaman dan harus ikut *coaching*, karena peraturan di UT banyak yang diperbaharui. UPBJJ perlu menanamkan prinsip bagi tenaga PJTU yang tidak

ikut *coaching* tidak boleh menjadi PJTU meskipun sudah berpengalaman.

Adapun kendala lain tentang pelaksanaan ujian adalah dengan keterbatasan jumlah tenaga PJTU dan PJLU di lapangan tidak dapat memantau secara sempurna tentang pelaksanaan ujian di daerah. Hal ini disebabkan tenaga yang disediakan untuk setiap lokasi ujian pada umumnya satu orang, sementara di lapangan lokasi yang dipakai kadangkala lebih dari dua lokasi dengan jarak yang cukup jauh, sehingga PJTU dan PJLU tidak bisa bekerja maksimal. Dengan demikian pengawasan terhadap kerja pengawas ruang tidak bisa maksimal. Meskipun ada pengawas keliling, tapi dengan jumlah lokal yang banyak juga tidak bisa memantau secara menyeluruh tentang kerja pengawas lokal. Karena masih adanya dijumpai joki-joki yang sangat merusak citra UT di mata masyarakat. Jadi untuk menjaga kualitas ujian UT, UT sebaiknya menambah tenaga yang dipercaya yang bisa bekerja dengan loyalitas tinggi untuk terjaminnya pelaksanaan ujian dengan baik. Para petugas yang ditunjuk harus mengadakan suatu perjanjian tertulis bahwa apabila petugas terbukti tidak bekerja dengan baik dan ditemui kegagalan-kegagalan di lokasi mereka bertugas, maka petugas tersebut diberikan sanksi yang cukup berat, misalnya tidak diikutkan bertugas untuk masa yang akan datang, serta di instansinya juga tetap dicap orang yang tidak loyal kepada tugas negara.

c. Tahap Pengiriman

Hasil ujian yang sudah terkumpul selama tiga hari di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan akan dibawa oleh PJTU ke UPBJJ untuk diserahkan kembali kepada panitia penerimaan hasil ujian, biasanya dibagi berdasarkan Kabupten/Kota yang ada di lingkungan UPBJJ-UT Padang. Panitia kemudian mengecek

semua kelengkapan yang harus disiapkan oleh seorang PJTU, mulai dari rekap hasil ujian, arsip absen mahasiswa perhari dan perlokal, berita acara pemusnahan naskah, absen pengawas perhari dan absen *coaching* pengawas.

Apabila semua persyaratan sudah lengkap, maka panitia menyerahkan ke Koordinator Registrasi dan Pengujian untuk siap dikirim ke UT Pusat maupun ke UPBJJ Sentra. Hasil ujian objektif dikirim langsung ke UT Pusat, sedangkan hasil ujian bentuk uraian diperiksa di UPBJJ Sentra, yaitu untuk wilayah Sumatera di UPBJJ Medan.

Pengiriman hasil ujian biasanya dipisahkan perhari ujian, dan juga antara hasil ujian uraian dan hasil ujian objektif juga harus dipisahkan. Karena tempat pengiriman hasil ujian tersebut ada dua lokasi, kadangkala terjadi kesalahan dalam pengepakan, yaitu hasil ujian uraian dengan objektif tidak dipisahkan oleh petugas di lapangan, sehingga kalau dalam satu ruang jam ujian itu ada ujian uraian dan objektif, pengawas lokal langsung saja memasukkan dalam satu sampul, bisa saja ditulis ujian uraian saja atau ujian objektif saja. Akhirnya lembaran jawaban mahasiswa yang ikut ujian objektif tidak ditemukan di UT Pusat atau sebaliknya hasil ujian uraian yang diikuti oleh mahasiswa tidak ditemukan di UPBJJ sentra. Akibatnya petugas di UPBJJ Sentra harus mengirim kembali lembaran jawaban ujian objektif ke UT Pusat, begitu juga sebaliknya. Permasalahan lain yang timbul nilai mahasiswa terlambat keluar, bahkan kadangkala bisa hilang di tengah jalan, karena jumlahnya sedikit, yang rugi adalah mahasiswa. Sebaiknya untuk pengaturan ujian dibuat peserta ujian uraian tidak digabung dengan peserta ujian objektif, sampul ujian uraian dan ujian objektif mempunyai beda yang jelas, agar kekeliruan tersebut tidak terjadi lagi.

2.5 Kerangka Berpikir

Berikut ini digambarkan kerangka berpikir dari penelitian yang berjudul “Penataan Naskah Ujian Perkabupaten dan Pengaruhnya Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Ujian Perluasan Mahasiswa Program Pendas di UPBJJ-UT Padang”.

Pelaksanaan ujian didasarkan pada daftar 20-an yang sudah dirancang perkabupaten, begitu juga untuk naskah ujiannya sudah ditata dari pusat. Daftar 20-an beserta naskah ujian yang sudah ditata perkabupaten tersebut, selanjutnya dikirimkan ke UPBJJ, namun setelah sampai di UPBJJ ditata ulang kembali untuk kelancaran pelaksanaan ujian di lokasi perluasan. Pada penataan ujian inilah terjadi ketidaksesuaian (gap).

Berikut ini digambarkan secara singkat bentuk atau awal terjadinya gap.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini direncanakan menggunakan desain survey dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang sebenarnya yang terjadi di UPBJJ khususnya UPBJJ-UT Padang.

3.2 Tempat dan waktu Penelitian

3.2.1 Tempat

Penelitian ini akan diadakan di UPBJJ-UT Padang yang terletak di jalan Pramuka Nomor 11 Khatib Sulaiman Padang. Penelitian ini akan dilakukan kepada semua staf UPBJJ yang bertugas sebagai panitia dalam persiapan pelaksanaan ujian program Pendas dan sekaligus bertugas sebagai Penanggung Jawab Tempat Ujian (PJTU) pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan yaitu di Kabupaten/Kota dan di Kecamatan-Kecamatan yang sudah melengkapi semua persyaratan yang ditentukan oleh UT Pusat dan UPBJJ-UT Padang.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2010, yaitu pada saat semua staf UPBJJ-UT Padang terlibat sebagai panitia persiapan pelaksanaan ujian program Pendas dan sekaligus bertugas sebagai Penanggung Jawab Tempat Ujian (PJTU) yang menyebar di lingkungan UPBJJ-UT Padang.

3.3 Sumber Data dan Objek Penelitian

Data penelitian ini adalah hasil wawancara dan penyebaran angket kepada staf UPBJJ–UT Padang yang bertugas sebagai Penanggung Jawab Tempat Ujian (PJTU) di lokasi Kabupaten /Kota maupun di lokasi perluasan yang berjumlah sebanyak 39 Orang, dengan rincian jumlah staf UPBJJ Padang sebanyak 21 orang ditambah 18 orang dosen dari perguruan Tinggi Negeri dan swasta setempat. Data ini adalah data primer yang diambil langsung dari sumbernya. Objek penelitian ini adalah proses kerja staf UPBJJ dalam memproses persiapan, pelaksanaan dan pengiriman hasil ujian akhir semester (UAS) mahasiswa Program Pendas ke UT Pusat.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah staf UPBJJ –UT Padang yang membuka lokasi ujian di Kabupaten/ Kota dan lokasi ujian perluasan dalam melaksanakan ujian akhir semester (UAS) untuk mahasiswa program Pendas. Khusus untuk lokasi ujian perluasan di UPBJJ UT Padang setiap semester cenderung selalu bertambah. Tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi pada pelaksanaan ujian program Pendas periode 2010.1.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah angket, pedoman wawancara dengan staf UPBJJ-UT Padang yang terlibat secara langsung dalam persiapan, dan pelaksanaan ujian akhir semester (UAS) di UPBJJ-UT Padang yang membuka lokasi ujian perluasan. Instrumen ini akan diujicobakan langsung di UPBJJ UT Padang untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya terhadap data yang akan diteliti di UPBJJ-UT Padang yang langsung dijadikan sampel.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini adalah gabungan dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan lewat instrumen pengumpulan data, observasi maupun lewat data wawancara dan data dokumentasi. Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data berupa interviu, observasi, maupun penggunaan instrumen khusus yang dirancang sesuai tujuannya.

Teknik pengumpulan data digunakan teknik angket dan wawancara. Angket disampaikan agar informan dapat memberikan informasi lebih leluasa, langsung, lengkap dan menyeluruh sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui pengisian angket dianalisis menggunakan statistik dengan metode penghitungan rata-rata dan hasilnya bisa dideskripsikan sehingga dapat terlihat dan terpenuhi tujuan penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif. Sedangkan untuk hasil wawancara dan pengamatan dideskripsikan untuk melihat keefektifan kerja staf UPBJJ –UT Padang berdasarkan bahan pendukung, daftar 20-an, dan pengepakan naskah ujian dalam persiapan pelaksanaan ujian di UPBJJ, dan pengiriman hasil ujian ke UT Pusat. Sebelum penelitian dilakukan ada beberapa persiapan yang harus dilakukan untuk mengumpulkan data, antara lain:

2. Orientasi guna memperoleh gambaran umum yang diperlukan untuk studi kelayakan tentang permasalahan penataan naskah ujian perkabupaten dapat diungkapkan secara ilmiah.
3. Eksplorasi fokus dilakukan dengan menyiapkan angket dan pedoman wawancara dengan semua staf UPBJJ-UT Padang yang terlibat langsung dalam kepanitiaan persiapan ujian akhir semester dan

sekaligus bertugas sebagai Penanggung Jawab Ujian(PJTU).. Wawancara dilakukan pada saat panitia sedang menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk setiap lokasi ujian di Kabupaten/Kota maupun lokasi ujian perluasan. Pencatatan dilakukan setiap ada kesempatan melakukan wawancara. Catatan tersebut dinamakan catatan lapangan. Catatan lapangan bisa juga dijadikan sebagai data “primer” yang dipercaya keabsahannya. Sedangkan penyebaran angket dilakukan setelah pelaksanaan ujian selesai, agar informan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dialaminya selama melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab tempat ujian (PJTU) di lapangan.

4. Pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi yang dikemukakan Dezin dan dijelaskan Patton: (1) Triangulasi dengan *sumber* yaitu membandingkan data angket dengan hasil wawancara, membandingkan panduan angket dengan kegiatan yang ada di lapangan observasi dan wawancara; (2) Triangulasi dengan memanfaatkan *peneliti* untuk terlaksananya kegiatan mempersiapkan semua bahan yang dibutuhkan selama pelaksanaan ujian program Pendas berlangsung; (3) Triangulasi dengan metode pengecekan data dilakukan dengan teknik angket dan teknik wawancara. Pemeriksaan dilakukan terhadap kegiatan yang tergambar dari hasil angket yang diisi oleh staf UPBJJ-UT Padang; (4) Triangulasi dengan teori dilaksanakan dengan penjelasan banding (*rival explanations*) yaitu dilakukan dengan mencari tema atau penjelasan pembanding atau penyaing (Moleong, 1988:178).

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1 Deskriptif

Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan seluruh staf UPBJJ-UT Padang yang terlibat secara langsung menjadi PJTU, ditambah dengan beberapa orang dosen dari Perguruan Tinggi yang ada di lingkungan UPBJJ-UT Padang yang dipercaya sebagai PJTU. Jumlah PJTU yang dibutuhkan untuk periode ujian 2010.1 program Pendas sebanyak 39 orang untuk 39 lokasi ujian yang tersebar di lingkungan UPBJJ-UT Padang.

Di samping itu peneliti juga mengedarkan angket untuk menambah kelengkapan data yang berkaitan dengan penataan naskah ujian, penataan daftar 20-an, dan pengiriman hasil ujian. Angket diedarkan kepada seluruh PJTU yang sudah ditunjuk oleh UPBJJ-UT Padang, dan semua angket yang diedarkan dapat terkumpul kembali.

Sementara untuk angket yang sudah disebarakan kepada seluruh PJTU yang ditunjuk, mereka mengisi sesuai dengan pengalaman mereka yang selama ini sudah menjadi PJTU. Angket berisi 10 buah pertanyaan berbentuk pilihan dan ditambah dengan lima buah pertanyaan terbuka terarah. Adapun pertanyaan pilihan adalah sebagai berikut:

a. Pertanyaan Pertama

Bagaimana pendapat anda tentang adanya lokasi ujian perluasan untuk mahasiswa?			
NO	JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	A	27	69.23%
2	B	9	23.08%
3	C	3	7.69%
TOTAL		39	100%

Untuk pertanyaan pertama merupakan pertanyaan yang mengarah pada persepsi dari seorang PJTU tentang lokasi perluasan ujian :

Data yang didapat bahwa 69.23% menyatakan bahwa ujian perluasan tersebut bernada positif, kalau dilihat dari geografis memang tidak bisa diukur dari jarak tempuh, namun karakteristik geografis di Sumatera Barat yang berbukit membutuhkan waktu yang lebih banyak dari rata-rata Km per-jamnya.

b. Pertanyaan Kedua

Ujian di Lokasi Perluasan Akan Memberikan Manfaat			
NO	JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	A	12	30.77%
2	B	18	46.15%
3	C	9	23.08%
TOTAL		39	100%

Pertanyaan kedua mengarah pada persepsi PJTU tentang beban kerja pengurus pokjar dan kemudahan yang akan diperoleh, baik oleh pengurus pokjar maupun oleh mahasiswa. Data yang didapat menunjukkan bahwa 46,15% menyatakan bahwa manfaat ujian

perluasan akan meringankan beban kerja pengurus pokjar. Mengingat kelompok belajar mahasiswa (pokjar) yang tersebar di seluruh pelosok Kecamatan, tidak memungkinkan mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian secara maksimal di Kabupaten, mengingat jauhnya jarak tempuh ke Kabupaten yang mengharuskan mahasiswa untuk mengeluarkan biaya lebih besar dan meninggalkan tugas untuk beberapa hari, karena harus menginap di lokasi ujian.

c. Pertanyaan Ketiga

Ditinjau dari beban kerja UPBJJ dengan Adanya Ujian Perluasan			
NO	JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	A	1	2.56%
2	B	11	28.21%
3	C	27	69.23%
TOTAL		39	100%

Pertanyaan ini lebih mengarah kepada bobot pekerjaan yang harus dilakukan oleh PJTU dengan adanya ujian perluasan di lingkungan UPBJJ. Dari data yang ada disimpulkan bahwa 69,23% responden menyatakan bahwa setiap PJTU dituntut untuk lebih teliti dalam menata bahan pendukung. Bahan pendukung di sini mulai dari penyiapan jumlah LJU dan BJU yang dibutuhkan di lokasi, jumlah dan jenis naskah yang harus disiapkan sesuai dengan daftar 20-an yang ada. Di samping itu PJTU juga harus teliti untuk melihat kode pos setiap kecamatan, karena mahasiswa yang ujian di lokasi perluasan adalah mahasiswa yang berasal dari suatu kecamatan tertentu.

d. Pertanyaan Keempat

Dengan Adanya Ujian Perluasan Apakah Penataan Bahan Pendukung dari UT Pusat Cukup Efektif			
NO	JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	A	4	10.26%
2	B	16	41.03%
3	C	19	48.72%
TOTAL		39	100%

Pertanyaan ini mengacu kepada keefektifan bentuk kerja UT Pusat dalam mempersiapkan bahan pendukung yang dikirim ke UPBJJ yang membuka ujian perluasan. Data yang didapat menunjukkan bahwa 48,72% responden menyatakan kurang efektif. Hal ini dikuatkan dengan apa yang selama ini diterima dari UT Pusat berkaitan bahan pendukung. Semua bahan pendukung dikirim oleh UT Pusat ke UPBJJ-UT berdasarkan kebutuhan untuk setiap Kabupaten. Sementara di lingkungan UPBJJ Padang bahwa tidak semua mahasiswa S1 PGSD dapat mengikuti ujian di Kabupaten, karena jauhnya jarak antara Kabupaten dengan Kecamatan tempat mereka berdomosili. Untuk mengantisipasi agar semua mahasiswa Program Pendas dapat mengikuti ujian dengan baik dibukalah lokasi ujian perluasan.

e. Pertanyaan Kelima

Apa hal yang paling mendasar dalam pelaksanaan ujian perluasan			
NO	JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	A	4	10.26%
2	B	25	64.10%
3	C	10	25.64%
TOTAL		39	100%

Pertanyaan ini mengacu kepada hal-hal yang paling mendasar yang perlu disiapkan secara matang dalam menghadapi ujian di lokasi perluasan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa 64,10% penataan kebutuhan jumlah dan jenis naskah ujian untuk seluruh peserta ujian harus disiapkan dengan matang. Hal ini karena di lokasi ujian perluasan belum tersedia Faximile dan mesin foto kopi yang bisa secara cepat mengatasi apabila terjadi kekurangan naskah ujian.

f. Pertanyaan Keenam

Sebaiknya bagaimana penataan daftar 20an untuk ujian perluasan			
NO	JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	A	26	66.67%
2	B	8	20.51%
3	C	5	12.82%
TOTAL		39	100%

Pertanyaan ini mengacu pada prosedur kerja petugas di UT pusat dalam penataan daftar 20-an. Data yang diperoleh menunjukkan 66,67% responden menyatakan bahwa penataan daftar 20-an sebaiknya sudah diatur perkecamatan sesuai kode

pos di Kecamatan oleh petugas di UT Pusat sebelum dikirim ke UPBJJ, sehingga petugas PJTU tidak perlu memilah dan menggunting-gunting daftar 20-an sesuai kecamatan tertentu.

g. Pertanyaan Ketujuh

Apa manfaat jika daftar 20-an telah ditata sebelum sampai ke UPBJJ (kaitannya dengan naskah ujian)			
NO	JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	A	1	2.56%
2	B	20	51.28%
3	C	18	46.15%
TOTAL		39	100%

Pertanyaan ini mengarah kepada dampak positif yang akan dirasakan oleh PJTU, jika penataan daftar 20-an diatur sesuai nama mahasiswa yang terdaftar di Kecamatan tertentu dengan kode pos yang benar oleh petugas dari UT Pusat. Data diperoleh menyatakan bahwa 51,28% responden menyatakan setuju penataan daftar 20-an langsung dikerjakan di UT Pusat. Hal ini sebaiknya dikaitkan juga dengan penataan naskah ujian yang diatur sesuai dengan kebutuhan disetiap Kecamatan yang ada, terutama bagi mereka yang membuka lokasi ujian perluasan.

h. Pertanyaan Kedelapan

Adakah Manfaat jika Naskah Ujian sudah ditata di Pusat			
NO	JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	A	4	10.26%
2	B	25	64.10%
	C	10	25.64%
TOTAL		39	100%

Pertanyaan ini mengacu kepada kerahasiaan naskah ujian yang sudah ditata dari UT Pusat. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa 64,10% responden menyatakan setuju kalau naskah ujian ditata langsung sesuai kebutuhan di setiap Kecamatan dan pengepakan berdasarkan kebutuhan setiap lokal seperti penataan naskah ujian untuk Mahasiswa program Non Pendas. Hal ini akan menjamin kerahasiaan naskah ujian sampai ujian tersebut berlangsung.

i. Pertanyaan Kesembilan

Keuntungan Naskah yang ditata Perkecamatan			
NO	JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	A	20	51.28%
2	B	17	43.59%
3	C	2	2.13%
TOTAL		39	100%

Untuk pertanyaan ini diarahkan kepada penataan naskah ujian yang disesuaikan dengan kebutuhan jenis dan jumlah soal perlokasi ujian. Data yang diperoleh menyatakan 51,28% responden menjawab bahwa penataan naskah ujian perkecamatan

akan memperlancar pelaksanaan ujian di lokasi perluasan, karena naskah sudah disusun sesuai jumlah mahasiswa yang akan mengikuti ujian di lokasi tersebut.

j. Pertanyaan Kesepuluh

Hal apa yang dirasakan selama menjadi PTJU Ujian Pendas			
NO	JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	A	3	7.69%
2	B	26	66.67%
3	C	10	25.64%
TOTAL		39	100%

Pertanyaan ini mengacu kepada pengalaman yang sering terjadi selama menjadi PJTU. Data yang diperoleh menunjukkan 66,67% responden menyatakan sering terjadinya kekurangan bahan pendukung ujian. Kekurangan ini biasanya disebabkan jumlah mahasiswa yang ikut ujian melebihi dari jumlah mahasiswa yang terdaftar dalam daftar 20-an, karena mereka mempunyai bukti yang sah untuk bisa diikutkan ujian, disamping itu hal lain yang sering menimbulkan kekurangan bahan pendukung karena mahasiswa sering salah pada saat mengisi identitas dalam LJU, belum lagi LJU yang rusak dan kotor. Semua itu akan mengakibatkan terjadinya kekurangan bahan pendukung di lokasi ujian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dari bab IV tentang hasil penelitian berdasarkan angket yang telah diisi oleh responden disimpulkan, penataan daftar 20-an sebaiknya disusun berdasarkan jumlah mahasiswa yang terdaftar pada suatu kecamatan tertentu. Hal ini akan mempermudah dalam membagi daftar 20-an tersebut pada saat ujian untuk lokasi perluasan. Daftar 20-an tidak harus dipotong-potong lagi berdasarkan kode pos suatu kecamatan dimana mahasiswa terdaftar pertama kali menjadi mahasiswa UT.

Penataan daftar 20-an yang selama ini dirancang oleh UT Pusat, mengharuskan petugas ujian di UPBJJ untuk menata ulang kembali hasil kerja panitia ujian dari UT Pusat, karena petugas di UPBJJ harus mengecek dan mencocokkan nama mahasiswa dengan kode pos kecamatan yang ada pada daftar 20-an. Daftar 20-an yang sudah utuh harus digunting-gunting kembali, karena nama peserta ujian di lokasi perluasan ada dalam daftar 20-an yang berasal dari beberapa kecamatan yang berbeda-beda.

Sementara dalam penataan naskah ujian, hasil penelitian menunjukkan penataan naskah ujian sebaiknya ditata berdasarkan kebutuhan jumlah mahasiswa perkecamatan, hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran naskah ujian tersebut sebelum ujian berlangsung. Di samping itu pekerjaan panitia ujian di UPBJJ menjadi lebih ringan, mereka tidak harus membongkar beberapa amplop naskah ujian yang sudah utuh untuk ditata ulang kembali sesuai jenis dan jumlah mahasiswa yang akan ikut ujian.

Meskipun PJTU harus membagi-bagi suatu naskah ujian ke beberapa lokal yang berbeda pada saat ujian, tapi naskah itu hanya dibuka dan dibagi pada saat jam ujian berlangsung. Jadi disamping kerahasiaan naskah terjamin, petugas di lapangan tidak harus membongkar naskah ujian sebelum ujian berlangsung.

Penataan naskah ujian seperti di atas akan sangat efektif baik dari segi waktu dan tenaga pada saat ujian Pendas dilaksanakan. Penanggung Jawab

Tempat Ujian (PJTU) hanya tinggal mencocokkan jenis dan jumlah naskah yang dibutuhkan untuk setiap lokal dan setiap jam ujian berlangsung.

Diharapkan penataan daftar 20-an dan naskah ujian di UT Pusat disesuaikan dengan kebutuhan jumlah mahasiswa yang terdaftar di suatu kecamatan tertentu, agar pekerjaan dalam mempersiapkan ujian program Pendas di daerah tidak terlalu repot dan banyak resiko. Lebih baik lagi jika petugas di UT Pusat bisa menyiapkan amplop naskah ujian seperti ujian program Non Pendas, yaitu jumlah dan jenis naskah disesuaikan dengan jumlah dan jenis mata kuliah yang akan diikuti oleh mahasiswa. Izin pembukaan lokasi ujian perluasan dikurangi agar tidak banyak mengandung resiko yang tidak diinginkan. Variasi jumlah pengepakan naskah lebih diperbanyak antara jumlah yang 20,10,5,3,2 dan 1, agar nantinya pada saat mempersiapkan bahan ujian tidak harus membongkar amplop naskah yang sudah ditata sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Brantas, 2009. *Dasar-Dasar manajemen*. Bandung: Alfabeta

Google ce 5099154b49f8.htm/tanggal 7 Februari 2010. Pukul 15.20 wib.
Jakarta: Bumi Aksara

Google <http://dewi.students-blog.undip.ac.id/2009/05/27/perbedaan-efisiensi-dan-efektivitas/>

Google <http://abulamedia.com/2009/10/13/5-prinsip-kerja-efektif/>

Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*.

ISO JKOP UJ01. (2009). Pedoman ISO

ISO JKOP UJ02 (2009). Pedoman ISO

Moleong, Lexy. 1988, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Poerwadarminta, WJS, 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka